KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Menkes: Semoga Memberi Manfaat Bagi Masyarakat
Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-7

Komisi IX DPR Setujui RUU Kesehatan Dibawa Ke Rapat Paripurna

Menkes: Semoga Memberi Manfaat Bagi Masyarakat

KOMISI IX DPR menyetujui RUU Kesehatan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menegaskan RUU ini nggak ujug-ujug.

Kemarin, Komisi IX DPR yang mengurusi masalah kesehatan bersama Menkes menggelar Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibuslaw bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, hadir juga Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hingga Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nizam.

Dalam rapat kemarin, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya atas RUU Kesehatan ini. Hasilnya, tujuh fraksi menyetujui RUU Kesehatan dibawa ke paripurna. Fraksi yang menyetujui adalah PDIP, PPP, PAN, Gerindra, Golkar,

♦ BERSAMBUNG KE HAL 7

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Menkes: Semoga Memberi

... DARI HALAMAN 1

NasDem, dan PKB.

"Yang menolak 2 fraksi yakni Fraksi Demokrat dan PKS. Jadi yang akan menandatangani 7 fraksi," kata Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Nihayatul saat memimpin Rapat Kerja.

Menkes menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR karena telah menginisiasi dan menyusun RUU Kesehatan. Dia berterima kasih karena usulan RUU dibahas secara konstruktif dan mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan sehingga bisa diimplementasikan dan memberi manfaat secepatnya bagi masyarakat," kata Menkes Gunadi Sadikin usai menghadiri Rapat Kerja.

Menkes mengatakan, RUU Kesehatan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas DPR pada Februari 2023. Kemudian, pada 7 Maret 2023, DPR menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden Jokowi dan ditindaklanjuti dengan menunjuk Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pihak pemerintah pada 9 Maret 2023.

Menkes mengatakan, wacana kemunculan RUU Kesehatan telah ramai diperbincangkan sejak akhir 2022. Tapi banyak pihak menganggap proses penyusunan RUU cenderung terburu-buru dan minim pelibatan masyarakat sipil.

Menanggapi catatan dan kritik masyarakat, kata Menkes, Kementerian Kesehatan RI mengadakan Public Hearing dan sosialisasi pada 13-31 Maret 2023 dengan melibatkan kelompok organisasi profesi, masyarakat sipil, dan kelompok terkait lainnya.

Menkes melanjutkan, Badan Legislasi (Banleg) DPR telah mengerjakan draft RUU Kesehatan sejak akhir tahun lalu dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi. "Kalau ada yang tidak puas, keinginannya tidak masuk, itu saya rasa wajar di alam demokrasi, pemerintah juga tidak semuanya keinginan bisa 100 persen diterima," katanya.

Menkes memaparkan, RUU Kesehatan telah melalui serangkaian perjalanan, sebelum diparipurnakan. Sejauh ini, pemerintah telah melaksanakan 115 kali kegiatan partisipasi publik, baik dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dan seminar yang dihadiri 1.200 pemangku kepentingan dalam bentuk organisasi dan 72 ribu peserta.

Selain itu, pemerintah juga sudah menerima 2.700 masukan. Baik secara lisan, atau digital melalui portal partisipasi. "Semua masukan yang diterima, kami pertimbangkan dengan cermat guna penyempurnaan RUU Kesehatan itu," kata Menkes.

Pembahasan RUU Kesehatan, kata Menkes, merupakan bagian dari upaya pemerintah dan DPR dalam mengarahkan kapal besar bangsa Indonesia, untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Melalui RUU Kesehatan, Menkes berharap, pelayanan kesehatan bisa bertransformasi menjadi lebih baik. Dari yang tadinya berfokus pada pengobatan, menjadi pencegahan. Dari akses yang susah, menjadi mudah.

Selain itu, RUU Kesehatan juga diharapkan merubah industri kesehatan luar negeri, menjadi mandiri di dalam negeri. Dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah, menjadi tangguh. Dari pembiayaan yang tidak efisien, menjadi transparan dan bersih.

Tak lupa dirinya mengatakan, perubahan juga menyasar kurangnya jumlah dan minimnya distribusi tenaga kesehatan, menjadi cukup dan merata. Termasuk perizinan yang rumit dan lama, menjadi cepat, mudah, dan sederhana. Serta menyediakan sistem informasi kesehatan yang terfragmentasi, menjadi terintegrasi. Tak ketinggalan meningkatkan teknologi kesehatan agar menjadi yang terdepan. ■ BYU